

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERISOLIR OLEH PT ADARO INDONESIA MELALUI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA PADA PROGRAM BINA KELURAHAN RANTAU KUJANG - KEGIATAN TOKO DESA

¹Aan Nurhadi, ²Yuri Budi Sujalmi, ³Meilanny Budiarti Santoso, ⁴Taufik Arbain,
⁵Muhammad Riyandi Firdaus, ⁶Muhammad Noor

^{1,2}PT. Adaro Indonesia

³Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

⁴Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung
Mangkurat

^{5,6}Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

¹aan.nurhati@adaro.com, ²yuri.sujalmi@adaro.com, ³mailanny.budiarti@unpad.ac.id,
⁴taufik.arbain@ulm.ac.id, ⁵riyandi@stiatabalong.ac.id, ⁶muhammadnoor@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat terisolir menjadi kebutuhan nyata dan PT Adaro Indonesia berhasil menjawab permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Rantau Kujang dengan melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa. Metode yang digunakan berupa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Validasi data dilakukan dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan baik dan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat terisolir. Dalam hal ini, perusahaan berhasil memberikan stimulus yang baik terhadap kelompok binaan yaitu Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) dengan memberikan bantuan berupa pembangunan toko desa yang didukung oleh pemerintahan setempat, sehingga dalam proses pengelolaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pemuda setempat dapat berjalan dengan baik dan berhasil menciptakan perubahan dan dampak positif bagi berbagai *stakeholder* program yang terlibat.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, stakeholder, perubahan

ABSTRACT

Empowering isolated communities is a real need and PT Adaro Indonesia has succeeded in responding to the problems and needs faced by the community in Rantau Kujang Subdistrict by implementing the Community Development and Empowerment Program (PPM) in the Rantau Kujang Subdistrict Development Program at the Village Shop Activity. The method used is a descriptive method with a qualitative approach, data sources are primary and secondary data sources. Data validation was carried out using method triangulation and source triangulation. The research results show that the program implementation is going well and can answer the problems and needs isolated communities face. In this case, the company succeeded in providing a good stimulus to the target group, namely the Village Business Management Agency (BPUK), by assisting in the form of building a village shop supported by the local government, so that the process of managing business activities carried out by local youth can run well. and succeeded in creating change and positive impacts for the various program stakeholders involved.

Keywords: community empowerment, stakeholders, change

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan isu sentral dalam proses pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Pemberdayaan dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan kemampuan, kekuatan dan kekuasaan kepada masyarakat rentan dan lemah, agar memiliki daya dalam menjalani kehidupannya. Zubaedi (2016) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya transfer kekuasaan sebagai penguatan modal sosial kepada kelompok masyarakat agar lebih produktif. Demikian pun dengan Sudarmanto dkk., (2020) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberikan kewenangan, otonomi, dan kepercayaan terhadap masyarakat. Dengan berdaya, masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki dan meningkatkan harkat dan martabatnya secara mandiri, sehingga memiliki ketahanan dalam menjalani berbagai sektor kehidupan mereka.

Kondisi berbeda dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan yang terisolir, sehingga upaya pencapaian kesejahteraan bagi mereka berjalan lambat. Salah satu faktor pembentuk kesejahteraan adalah berupa pertumbuhan ekonomi dan menurut Pakasi dkk., (2019) pertumbuhan ekonomi yang lambat pada masyarakat perbatasan yang terisolir terjadi dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung, seperti minimnya sarana angkutan transportasi dan masih terbatas atau bahkan langka.

Proses pembangunan yang ditunjukkan oleh kemajuan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan yang terisolir belum dibarengi oleh ketersediaan fasilitas angkutan yang memadai, sehingga

mobilitas sosial ekonomi masyarakat tidak berjalan lancar dan hal ini menjadi salah satu penyebab wilayah perbatasan yang terisolir nampak tertinggal dan menjadi terbelakang (Pakasi dkk., 2019). Demikianpun halnya di wilayah Kelurahan Rantau Kujang yang hanya dapat diakses dengan menempuh perjalanan melalui aliran sungai Barito menggunakan sarana transportasi air yaitu berupa kapal bermesin dan masyarakat lokal menyebutnya sebagai *kapal klotok*.

Letak geografis wilayah Kelurahan Rantau Kujang sangat sulit untuk dijangkau serta sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai, membuat biaya atau ongkos untuk dapat menjangkau Kelurahan Rantau Kujang menjadi mahal dan di sisi lain masyarakat pun terancam bahaya jika saat di perjalanan menembus aliran sungai Barito terjadi hujan lebat. Letak geografis dan kondisi alam sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah terpencil, terutama dalam proses pembangunan infrastruktur yang sangat bergantung pada faktor cuaca maupun kondisi alam setempat.

Kelurahan Rantau Kujang merupakan salah satu wilayah Ring I pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Adaro Indonesia, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraktif berupa pertambangan batubara di wilayah Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Selatan yang mendapatkan *mandatory* untuk melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), yaitu berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi tersebut, PT Adaro Indonesia menjalankan kewajibannya dengan melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018, salah satunya yaitu berupa Program Bina Desa/Kelurahan merupakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) prioritas bagi desa-desa yang berada pada wilayah Ring I PT Adaro Indonesia. Hal tersebut pun sejalan dengan yang diamanatkan oleh dokumen hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa dilaksanakan sebagai bentuk fasilitasi perusahaan terhadap masyarakat binaan yaitu berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Rantau Kujang yang hidup dalam wilayah terpencil. Secara lebih terperinci, Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa dirancang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas. Berdasarkan hasil *assessment* terhadap kondisi kehidupan masyarakat setempat, berikut ini adalah permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Rantau Kujang, yaitu:

- 1) Keterbatasan akses yang dihadapi oleh masyarakat binaan karena tinggal di wilayah dengan kondisi geografis terpencil dan hanya tersedia akses transportasi sungai untuk menjangkau lokasi Kelurahan Rantau Kujang. Masyarakat sulit memperoleh layanan percetakan, fotocopy dan ATK. Bahkan untuk

mendapatkan hasil percetakan, masyarakat harus menghabiskan waktu selama dua hari dan membutuhkan biaya mahal. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul kebutuhan pembangunan toko yang menyediakan layanan percetakan, fotocopy dan alat tulis yang mudah dijangkau oleh institusi formal dan masyarakat di wilayah Kelurahan Rantau Kujang.

- 2) Biaya yang mahal harus dikeluarkan oleh masyarakat Kelurahan Rantau Kujang untuk mengakses layanan percetakan, fotocopy dan alat tulis, sehingga masyarakat menghadapi keterbatasan untuk menjangkau berbagai layanan tersebut.
- 3) Permasalahan keuangan yang dihadapi oleh instansi formal dan masyarakat untuk membayar secara *cash* layanan percetakan, fotocopy dan pembelian alat tulis, sehingga membutuhkan fasilitasi penundaan pembayaran
- 4) Minimnya pengetahuan dan keterampilan SDM Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) dalam mengelola kegiatan usaha, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola kegiatan usaha.
- 5) Masyarakat Kelurahan Rantau Kujang menghadapi keterbatasan dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Hal tersebut menunjukkan kondisi wilayah perbatasan yang terpencil dan terisolir yang selama ini dikelola dengan mengedepankan pendekatan keamanan (*safety belt approach*), sehingga telah mengenyampingkan pendekatan

pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Di sisi lain, penguatan modal sosial, ekonomi, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta budaya masyarakat harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengelola kegiatan usahanya secara produktif. Adi (2012) menjelaskan diperlukan hal-hal berikut ini sebagai prasyarat untuk dapat membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat:

- 1) *Enabling*, yaitu sebagai upaya untuk menciptakan suasana dan iklim yang memberikan kemungkinan bagi potensi masyarakat dapat berkembang. Berbagai bentuk potensi yang dimiliki oleh masyarakat dapat dibangun dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing.
- 2) *Empowering*, yaitu upaya membangkitkan kapasitas masyarakat dengan cara memperkuat potensi yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat dengan cara menyediakan berbagai input dan membuka berbagai peluang yang membuat masyarakat semakin berdaya.
- 3) *Protecting*, yaitu upaya melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Perlindungan dalam hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak

seimbang dalam masyarakat serta melindungi masyarakat lemah dari eksploitasi masyarakat yang lebih kuat.

Dengan terlaksananya berbagai prasyarat dalam membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat tersebut, maka tujuan dari pemberdayaan masyarakat pun dapat tercapai. Adapun berbagai tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah seperti yang dikemukakan oleh Mardikanto (2014) yaitu:

- 1) Perbaikan kelembagaan (*better institutions*); yaitu perbaikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, sehingga diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha;
- 2) Perbaikan usaha (*better business*); yaitu berupa perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan kegiatan dan perbaikan kelembagaan, sehingga diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;
- 3) Perbaikan pendapatan (*better income*); yaitu terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat;
- 4) Perbaikan lingkungan (*better environment*), yaitu berupa perbaikan pendapatan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial);
- 5) Perbaikan kehidupan (*better living*), yaitu berupa perbaikan tingkat pendapatan dan lingkungan yang menarik, sehingga diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;

6) Perbaiki masyarakat (*better community*), yaitu berupa kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka pada dasarnya, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilakukan oleh perusahaan merupakan investasi sosial yang perusahaan, sehingga diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, melainkan juga dapat menciptakan perubahan positif dan kebermanfaatan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat (Santoso, et al., 2021). Pernyataan tersebut relevan dengan spirit yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia dalam melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai investasi sosial perusahaan dan diasumsikan akan menghasilkan kebermanfaatan dan dampak positif bagi *stakeholder* program, yaitu berupa keuntungan secara finansial sebagai hasil monetisasi dari dampak yang diperoleh ataupun keuntungan berupa perubahan dan dampak positif sebagai nilai sosial atau *benefit* bagi *stakeholder* program.

METODE

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah berupa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu berasal dari berbagai pihak yang ditemui di lapangan dalam proses pengumpulan data, yaitu diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data

berupa teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), teknik observasi dan teknik *focus group discussion* (FGD). Adapun sumber data sekunder diperoleh dari berbagai macam dokumen dan publikasi terkait persoalan yang dibahas, yaitu dengan menggunakan teknik studi literatur.

Dalam penelitian ini, proses validasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu berupa triangulasi metode dan triangulasi sumber, sehingga data yang diperoleh berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder dapat tervalidasi keberadaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa merupakan salah satu bentuk implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Adaro Indonesia di wilayah Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan sebagai wilayah Ring I perusahaan. Di sisi lain, pelaksanaan program ini sejalan dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan di Tingkat Kelurahan (MUSRENBANG-KEL) dan masyarakat menyepakati dilaksanakannya kegiatan toko desa sebagai salah satu unit usaha BUMDes/BUMKel Rantau Kujang. Pertimbangan melakukan kegiatan toko desa adalah bahwa masyarakat Kelurahan Rantau Kujang menghadapi berbagai hambatan diantaranya adalah untuk mengakses layanan percetakan, fotocopy dan hambatan untuk memperoleh alat tulis bagi masyarakat.

Implementasi Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa dilakukan dalam bentuk kegiatan pembangunan toko yang dilaksanakan pada bulan Oktober hingga

Desember tahun 2021. Setelah bangunan fisik toko selesai didirikan, berikutnya pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Mei dimulailah kegiatan usaha percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis yang dikelola oleh para pemuda yang berasal dari wilayah setempat. Keberadaan toko usaha percetakan, fotocopy dan alat tulis tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat Kelurahan Rantau Kujang karena akses masyarakat untuk mendapatkan layanan percetakan, fotocopy dan membeli alat tulis sangat terbatas dan sulit untuk dijangkau, mengingat letak wilayah Kelurahan Rantau Kujang yang berada di lokasi terpencil dan hanya dapat diakses dengan menggunakan sarana transportasi sungai, sehingga membutuhkan biaya yang mahal dalam waktu yang lama untuk masuk ataupun keluar dari wilayah Kelurahan Rantau Kujang.

Lokasi keberadaan toko usaha percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis sangat strategis yaitu berada di RT.10 yang merupakan wilayah perkantoran dan sekolah, sehingga memudahkan masyarakat sekitar dalam memperoleh layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengelolaan toko usaha percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis tersebut dikelola secara profesional oleh para pemuda yang berasal dari wilayah setempat, sehingga kehadiran toko tersebut menjadi media pembelajaran manajemen kegiatan usaha bagi para pemuda setempat.

Toko usaha percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis secara struktur organisasi menjadi salah satu unit usaha desa/kelurahan yaitu di bawah BUMDes/BUMKel, sehingga aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan toko dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pelaksanaan Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa berhasil membentuk

kelembagaan sosial ekonomi dalam masyarakat yang kemudian dapat berperan dalam mendukung keberlanjutan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bago masyarakat di wilayah Ring I Perusahaan.

Berbagai kelembagaan (dalam kajian ini mencakup kelembagaan sebagai organisasi dan juga kelembagaan sebagai institusi kemunitas) yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa adalah sebagai berikut: (1). Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK), (2). Pengelola BUMDes Rantau Kujang, (3). Masyarakat Kelurahan Rantau Kujang, (4). Kelurahan Rantau Kujang, (5). Kecamatan Jenamas, (6). Puskesmas Kelurahan Rantau Kujang, (7). SMA Rantau Kujang, (8). SMK Rantau Kujang, (9). Madrasah Ibtidaiyah Al Mursyidul Amin, (10). Kepala Desa Tampulang, (11). SMP Tampulang, (12). SMP Rantau Bahuang, (13). Panitia penyelenggara kegiatan peringatan hari besar keagamaan di wilayah Kelurahan Rantau Kujang, (14). Panitia penyelenggara kegiatan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kelurahan Rantau Kujang.

Berbagai kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa tersebut saling terhubung, bekerjasama dan saling berkontribusi dalam menciptakan kebermanfaatan dan dampak positif bagi *stakeholder* program yang terlibat.

Dalam menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Rantau Kujang, implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai proses yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia untuk menciptakan perubahan dan

dampak positif dilakukan bekerjasama dengan Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) selaku kelompok pelaksana program, sehingga menghasilkan berbagai output yang diharapkan. Berikut ini adalah berbagai proses dan output yang dihasilkan dengan dilaksanakannya Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat karena faktor kondisi geografis lokasi Kelurahan Rantau Kujang yang berada di wilayah terpencil dan terisolir, sehingga hanya tersedia akses transportasi sungai untuk menjangkau lokasi kelurahan. Dalam kondisi demikian, masyarakat sulit memperoleh layanan percetakan, fotocopy dan alat tulis. Bahkan untuk mendapatkan hasil percetakan masyarakat harus menghabiskan waktu selama dua hari dan harus menginap di sekitar tempat lokasi percetakan, sehingga membutuhkan biaya mahal.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pada tahun 2021 muncul gagasan yang berasal dari para pemuda untuk membangun toko yang menyediakan layanan percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis di wilayah Kelurahan Rantau Kujang dan hal tersebut kemudian didiskusikan serta disepakati oleh masyarakat pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbang-Kel).

Pembangunan toko tersebut dilakukan di lokasi yang strategis, yaitu berdekatan dengan lokasi sekolah dan perkantoran pemerintahan,

sehingga mudah untuk dijangkau oleh konsumen yang banyak berasal dari para siswa sekolah dan juga dari perkantoran. Adapun output yang diperoleh dengan dilakukannya aktivitas tersebut adalah bahwa Kegiatan Toko Desa secara organisasi menjadi salah satu unit usaha BUMDes/BUMKel Rantau Kujang, sehingga berpotensi dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 2) Keterbatasan masyarakat Kelurahan Rantau Kujang dalam mengakses layanan percetakan, fotocopy dan alat tulis. Beberapa upaya dilakukan untuk menangani kebutuhan tersebut yaitu:

- a) Membangun toko yang menyediakan layanan percetakan, fotocopy dan menjual alat tulis, sehingga tersedia toko yang menyediakan layanan percetakan, fotocopy dan alat tulis bagi masyarakat sekitar, sehingga mudah untuk dijangkau

- b) Pemberian izin dari Pemerintah Kelurahan Rantau Kujang kepada Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) untuk menggunakan tanah aset daerah, sehingga tersedianya tanah aset daerah seluas 6 x 4 m² untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan toko

- c) Pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan kegiatan usaha percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis, sehingga diperolehnya bantuan berupa peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan usaha

percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis oleh Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) dari PT Adaro Indonesia

- d) Berjalannya kegiatan usaha percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis, sehingga beberapa stakeholder program memperoleh dampak positif, yaitu Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) dapat menjalankan kegiatan usaha percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis; memperoleh omset dari kegiatan usaha layanan percetakan, fotocopy dan penjualan alat tulis. Adapun beberapa institusi formal di wilayah Kelurahan Rantau Kujang dapat menghemat biaya transportasi untuk memperoleh layanan percetakan, fotocopy dan membeli alat tulis karena sebelumnya dilakukan di daerah Amuntai, sehingga dapat menghemat biaya transportasi.
- 3) Permasalahan keuangan yang dihadapi oleh instansi formal dan masyarakat untuk membayar secara *cash* layanan percetakan, fotocopy dan pembelian alat tulis dapat ditangani dengan keringanan pembayaran yang diberikan oleh Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) dengan melakukan pengelolaan sisa uang modal kegiatan usaha, sehingga dapat memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran (menghutangkan) bagi institusi formal dan masyarakat umum untuk mendapatkan layanan percetakan, fotocopy dan

pembelian alat tulis. Berbagai pihak mendapatkan kebermanfaatan dari keringanan yang diberikan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Institusi formal di wilayah Kelurahan Rantau Kujang dan sekitarnya mendapatkan keringanan untuk menunda pembayaran (menghutang) biaya percetakan, fotocopy dan pembelian alat tulis hingga diperolehnya dana BOS dari pemerintah
- b) Para pimpinan institusi formal di wilayah Kelurahan Rantau Kujang mendapatkan keringanan dari beban financial, yaitu tidak perlu mengeluarkan dana talangan untuk membayar biaya percetakan, fotocopy dan pembelian alat tulis sebagai kebutuhan dari institusi yang dipimpinnya.
- c) Masyarakat umum di wilayah Kelurahan Rantau Kujang pun mendapatkan keringanan untuk menunda pembayaran (menghutang) pembelian alat tulis.
- d) Semula Kepala Sekolah SMP Rantau Bahuang mengalami stress karena waktu pencairan dana BOS terhutang lama, sehingga sebelum adanya toko desa seringkali harus membayar kebutuhan percetakan, fotocopy dan pembelian alat tulis menggunakan uang pribadi terlebih dahulu. Dengan adanya fasilitas penundaan pembayaran dari Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK), maka Kepala Sekolah SMP Rantau Bahuang terhindar dari *stress*

dan tidak perlu membayar berbagai kebutuhan sekolah dengan menggunakan uang pribadi terlebih dahulu.

Sebagai bentuk pelayanan kepada konsumen, Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) memberikan layanan pesanan atau pembelian alat tulis melalui aplikasi *whatsapps* ataupun *facebook* dan layanan antar gratis, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memesan alat tulis dengan menggunakan aplikasi *whatsapps* ataupun *facebook* yang mudah untuk diakses oleh masyarakat dan masyarakat pun dan mendapatkan layanan antar barang secara gratis. Harga layanan percetakan, fotocopy dan alat tulis yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) pun lebih murah jika dibandingkan dengan layanan serupa di tempat lain di wilayah Kelurahan Rantau Kujang, sehingga masyarakat ataupun institusi formal lebih memilih untuk berlangganan di toko desa.

- 4) Permasalahan minimnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia pada Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) dalam mengelola kegiatan usaha, sehingga membutuhkan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi para pengurus Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) dan Pengelola BUMDes, sehingga terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes

- 5) Masyarakat Kelurahan Rantau Kujang membutuhkan bantuan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, sehingga Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) menyisihkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha untuk membantu kegiatan sosial kemasyarakatan dan rumah ibadah di wilayah Kelurahan Rantau Kujang pun memperoleh bantuan dari Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) berupa air minum dalam kemasan sebanyak 50 kardus di tahun 2022 yang diberikan kepada panitia penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kepada panitia penyelenggaraan kegiatan peringatan hari hari kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kelurahan Rantau Kujang.

Pencapaian yang diperoleh dengan dilakukannya kegiatan toko desa menunjukkan terjadinya proses pemberdayaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai pijakan awal pertumbuhan ekonomi pedesaan (Iyan, et al., 2020). Demikian pun dengan dukungan yang diberikan oleh pihak pemerintahan Kecamatan Jenamas dan Kelurahan Rantau Kujang, hal tersebut menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi strategi pengembangan kegiatan usaha di tingkat desa, selain faktor partisipasi masyarakat dan juga kemampuan pengelola kegiatan usaha (Kurniasih et al., 2019).

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang

dilakukan terhadap masyarakat desa penting untuk dilakukan, mengingat desa memiliki peranan penting dalam proses pembangunan nasional, bahkan di Indonesia, sebagian besar penduduk cenderung bermukim di wilayah pedesaan, sehingga pembangunan di wilayah desa akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap upaya menciptakan stabilitas di tingkat nasional (Sa'dullah, 2016).

Selain itu, Sidik (2015) menjelaskan bahwa posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi patokan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan Masyarakat, sehingga perencanaan serta realisasi tujuan bernegara terdapat pada tingkat desa. Dengan demikian, pembangunan pedesaan telah menempatkan desa sebagai sarana dari proses pembangunan, sehingga tujuan dari pembangunan untuk mengurangi berbagai kesenjangan diharapkan dapat diwujudkan.

Faktanya, kondisi pembangunan di tingkat desa dipandang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan yang terjadi di kota, baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan di pedesaan, namun hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terhadap kondisi tersebut, salah satu penyebab terjadinya kegagalan pembangunan desa tersebut adalah besarnya campur tangan pemerintah di tingkat pusat, sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengembangan perekonomian di tingkatdesa.

Budiono (2015) menjelaskan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat dalam mengelola secara mandiri pembangunan di lingkup desa, yaitu melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Demikian pun dengan Nursan dkk., (2019) yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan mengingat pembangunan ekonomi di tingkat nasional harus di mulai dari pembangunan ekonomi di tingkat desa.

Ansari (2016) menjelaskan bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan ekonomi desa yaitu melalui kewirausahaan desa, yang dapat menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat desa. Kewirausahaan desa dapat dikembangkan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) beserta berbagai unit usahanya (Prabowo, 2014). Demikian pun dengan Ramadana dkk., (2013) yang menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai kegiatan usaha di tingkat desa akan terealisasi jika dikelola secara terarah dan profesional, sehingga dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di desa dan dapat mendorong serta menggerakkan perekonomian di tingkat desa.

Hal tersebut tampak pada pengelolaan kegiatan toko desa sebagai bentuk kolaborasi antara kelembagaan formal perusahaan dengan pengelola di tingkat desa, sehingga terjadi interaksi antara kebutuhan dan permasalahan di satu sisi dengan berbagai potensi dan fasilitasi pada sisi lain. Terkait hal tersebut, Sofyan (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan kelembagaan di tingkat desa memerlukan berbagai

informasi secara akurat dan tepat yaitu mengenai karakteristik lokal desa seperti ciri sosial budaya masyarakat setempat dan peluang-peluang pada pasar atas produk barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh masyarakat lokal, sehingga dapat mendorong kemajuan kegiatan usaha.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Kelurahan Rantau Kujang secara bertahap. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa tidak hanya berupa tersedianya layanan percetakan, fotocopy dan alat tulis bagi masyarakat setempat, melainkan juga terbentuknya kegiatan usaha yang berkelanjutan dan dapat menciptakan berbagai dampak positif lainnya bagi SDM yang terlibat dalam Badan Pengelola Usaha Kelurahan (BPUK) dan secara luas bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Rantau Kujang, sehingga di kemudian hari dapat menciptakan keberlanjutan kegiatan usaha dan kemandirian bagi pengelola program. Dengan dilakukannya kajian *social return on investment* (SROI) terhadap Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa, maka berbagai perubahan dan dampak yang tercipta dari pelaksanaan program dapat teridentifikasi dan menunjukkan tahapan pencapaian tujuan pelaksanaan program dapat tercapai seiring dilakukannya berbagai kegiatan dalam program.

Bagi perusahaan, pelaksanaan Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa berhasil menciptakan benefit berupa *engagement*

yang positif di antara perusahaan dengan masyarakat sekitar di wilayah Ring 1, pemerintah setempat serta *stakeholder* program lainnya; Membentuk reputasi yang baik bagi perusahaan di mata masyarakat wilayah Ring I khususnya; Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan; Sebagai wujud kepatuhan perusahaan pada regulasi pemerintah; Sebagai justifikasi keterlibatan perusahaan dalam pembangunan masyarakat disekitar operasional perusahaan (wilayah Ring I); Dengan demikian, Program Bina Kelurahan Rantau Kujang pada Kegiatan Toko Desa dalam jangka panjang menjadi salah satu upaya bagi perusahaan dalam menyiapkan keberlanjutan kehidupan masyarakat binaan di wilayah Ring I perusahaan dalam menghadapi situasi dan kondisi pasca tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. 2012. Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Jakarta: Humaniora
- Ansari, B., Seyed, M. M., Azita, Z., & Masoumeh, A. (2013). Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. *Research Journal of Environmental and Earth Science*. 5(1). 26-31.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- Iyan, Mawung, A. S., & Mantikei, B. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of*

- Environment and Management. 1(2). 103-111.
- Kurniasih, D., Setyoko, P.I. and Wijaya, S.S., 2019. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 134-143.
- Mardikanto, T. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Jawab Sosial Koperasi*. Bandung: Alfabeta
- Nursan, M., & Utama FR., A. F. 2019. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Pertanian Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Social Economic of Agriculture*. 8(2). 67-78.
- Pakasi, U., Veplun, D., Sari, A., & Sofyan, A., 2019. Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua. *Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan VI*. Universitas Hasanuddin, Makasar 21 Juni 2019.
- Prabowo, T. H. E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal* 30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice). 19-26.
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Sa'dullah. (2016). Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Available: <http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio-visual-dalampengembangan-kawasan-perdesaanagropolitan>. Accessed 18 July 2016.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(2), 115-131.
- Sofyan, A. (2015). Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. *Keuangan Desa: Media Referensi dan Diskusi Keuangan Desa*. <http://www.keuandangesa.com/2015/09/prinsip-tata-kelola-badanusaha-milik-desa/>. Accessed July 20, 2016
- Sudarmanto, Eko, Erika Revida, Nur Zaman, Marulam MT Simarmata, Sukarman Purba, Syafrizal Syafrizal, Erniati Bachtiar, Annisa Ilmi Faried, Nasrullah Nasrullah, Ismail Marzuki, Puji Hastuti, Jamaludin, Irwan Kurniawan, Faizah Mastutie, and Susilawaty Andi. 2020. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Edited by A. Karim and J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Zubaedi. 2016. *Pengembangan Masyarakat*. 3rd ed. Jakarta: Kencana.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol.4 No. 3	Hal : 151-162	Desember 2023
--	--	-------------	---------------	---------------